

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Good Governance*

2.1.1.1 Pengertian *Good Governance*

Governance dapat diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintahan dan warga dalam mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa layanan serta infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dalam suatu komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan hal itu berarti adanya redefinisi peran serta warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, diantaranya yaitu untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi.

Pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* untuk tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap belum kompeten. Pada kondisi ini, pemerintah daerah selalu diragukan

kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Disisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Good governance adalah suatu konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pembangunan sektor publik (Mardiasmo, 2009: 18).

Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya yang harus diterapkan untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam suatu organisasi, sehingga tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang sudah direncanakan (Wijaya et al., 2018: 6).

LAN dan BPKP (2001: 6) menyatakan bahwa *Good Governance* merupakan penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantaranya domain- domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).

Pengertian *Good Governance* menurut World Bank yang dikutip oleh Mardiasmo (2002: 17) memberikan definisi *governance* sebagai:

“The way state power is used in managing economic and social resources for development of society”.

Adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dari beberapa definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *good governance* merupakan suatu penyelenggara pemerintah dengan tata kelola yang efektif dan efisien yang harus diterapkan untuk tercapainya tujuan organisasi yang maksimal. Erat kaitannya dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara dan masyarakat yang dilandasi dengan etika yang profesional

2.1.1.2 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.

Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (2003:7) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena partisipasi orang tua,

pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

2. Penegakan hukum (*Rule Of Law*)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

3. Transparansi (*Transparency*)

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan *supervisor* kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

4. Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni *supervisor* yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan. Atasan juga harus bisa memahami kebutuhan

masyarakatnya, jangan sampai *supervisor* menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. *Supervisor* harus bisa menganalisa kebutuhankebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian *supervisor* dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. Kesenjangan dan keadilan (*Equity*)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh *supervisor* dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan *supervisor* yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

7. Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari

berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban *supervisor* terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap *supervisor* harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi *supervisor* dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

2.1.1.3 Pilar-pilar *Good Governance*

Good governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Menurut Nico Adriyanto (2007: 26), jenis lembaga tersebut adalah:

1. Negara

- a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil;
- b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;

- c. Menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*;
 - d. Menegakkan HAM;
 - e. Melindungi lingkungan hidup;
 - f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan *public*.
2. Sektor Swasta
- a. Menjalankan industri;
 - b. Menciptakan lapangan kerja;
 - c. Menyediakan insentif bagi karyawan;
 - d. Meningkatkan standar hidup masyarakat;
 - e. Memelihara lingkungan hidup;
 - f. Mentaati peraturan.
3. Masyarakat
- a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi;
 - b. Mempengaruhi kebijakan publik;
 - c. Sebagai sarana *check and balance* pemerintah;
 - d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah;
 - e. Sarana komunikasi agar anggota masyarakat.

Agar *good governance* dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan dari semua pihak. Baik itu pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Dan untuk mencapai *good governance* yang efektif dan efisien, kesetaraan, interpretasi, serta etos kerja dan moral yang tinggi, harus dipegang teguh oleh seluruh komponen yang berkaitan langsung dengan *good governance*.

Ketiga lembaga di atas merupakan pendukung utama dalam terciptanya *good governance*. Sistem pemerintahan yang baik dapat diwujudkan apabila terciptanya sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Negara harus mampu menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya suatu pemerintahan yang baik.

Adanya perbaikan mengenai sistem politik, sistem pemerintahan dan lebih memperhatikan dalam pelayanan publik. Kondisi seperti ini dapat menarik minat kalangan swasta untuk berkembang lagi. Jika usaha swasta ini meningkat maka pengangguran dapat teratasi dengan adanya investasi di negeri ini.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mulyadi (2014: 163) mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandaan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen.

Sedangkan menurut Romney dan Steibart (2015: 226) mengemukakan Sistem pengendalian intern adalah suatu proses karena termasuk ke dalam aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan pengelolaan organisasi

Dari beberapa penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaraan tersebut yaitu untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang disusun dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dari dibangunnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Mahmudi (2010: 20) adalah:

1. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara;
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat;
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal;
4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Sistem Pengendalian Pemerintah/SAP);
5. Untuk efisiensi dan efektifitas operasi;
6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.2.3 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berikut merupakan unsur-unsur dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008) :

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

2. Penilaian Risiko

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan berpedoman pada pertauran perundang-undangan. Penilaian risiko ini terdiri atas:

- a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan;
- b. Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan;
- c. Identifikasi risiko;
- d. Analisis risiko;
- e. Mengelola risiko selama perubahan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari:

- a. *Review* atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;

- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja pemerintah;
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian ;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya manusia dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Mahmudi (2010: 22) menyatakan bahwa komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian intern khususnya kegiatan pengendalian antara lain:

- a. Sistem dan prosedur akuntansi;
- b. Otorisasi;
- c. Formulir, dokumen, dan catatan;
- d. Pemisahan tugas.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan identifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif dan efisien. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif

dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan saran komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemimpin instansi pemerintah harus melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pada dasarnya adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2016: 67). Kinerja seseorang adalah kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya (Sulistiyani, 2003: 223).

Secara umum kinerja dapat diartikan sebagai keseluruhan proses bekerja seorang individu yang hasilnya dapat digunakan sebagai landasan guna mengukur

apakah pekerjaannya tersebut baik atau buruk. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil tidaknya tujuan dari organisasi tersebut yang telah ditetapkan. Jika kinerja yang dihasilkan oleh suatu organisasi buruk maka akan berpengaruh juga terhadap organisasi tersebut.

Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan sesuatu organisasi dapat dilakukan melalui penialain kinerja, baik itu untuk penilaian kinerja anggota maupun penilaian kinerja organisasi. kinerja anggota pada akhirnya akan bermuara pada kinerja organisasi. untuk menilai suatu kinerja naggota maka dibutuhkannya indikator-indikator kinerja.

Dari beberapa pengertian di atas, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah adalah proses pencapaian kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang menjadi tolak ukur baik atau buruknya hasil kinerja, serta dapat dikatakan kinerja suatu organisasi sangat mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi yang telah direncanakannya.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam meningkatkan kualitas kinerja baik individu maupun instansi, maka perlu beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja antara lain:

1. Faktor Kemampuan

Kemampuan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang karena dengan kemampuan yang sesuai pada bidangnya dan keahliannya maka akan menghasilkan kinerja yang maksimal pula. Faktor kemampuan diantaranya meliputi pendidikan, pengalaman bekerja, dan keterampilan.

2. Faktor Motivasi

Selain faktor kemampuan adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja salah satunya yaitu faktor motivasi. Motivasi menjadi landasan seseorang untuk dapat meningkatkan kepercayaan dirinya atas kemampuan yang dimiliki serta kepercayaan untuk dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Motivasi lebih terhadap sikap seseorang dalam menghadapi suatu situasi kerja (Mangkunegara, 2016: 67).

2.1.3.3 Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Soleh dan Suripto (2011: 7) menyatakan bahwa tingkatan kinerja pemerintah daerah, dapat dibagi menjadi:

1. Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan ini menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan DPRD, karena kedua institusi inilah pihak yang menentukan dan mengambil kebijakan daerah. Umumnya Kepala Daerah mengajukan Rancangan Kebijakan (Peraturan Daerah) dan DPRD yang membahas dan menyetujuinya, atau sebaliknya Rancangan Peraturan Daerah lahir atas inisiatif DPRD dan Kepala Daerah yang membahas dan kemudain menyetujuinya.

2. Kinerja Program

Apabila kinerja kebijakan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan DPRD, maka kinerja program menjadi tanggung jawab dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3. Kinerja Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, dengan demikian satu program dapat terdiri atas satu atau lebih kegiatan. Apabila Kepala Daerah dan DPRD bertanggungjawab atas benar atau salahnya suatu kebijakan dan Kepala SKPD bertanggungjawab atas tepat atau tidaknya program dan implementasinya, maka para kepala sub Bagian, Kepala Bidang dan atau para Kepala Urusan bertanggungjawab atas terlaksana tidaknya suatu kegiatan.

2.1.3.4 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Kinerja utama pemerintah daerah salah satunya yaitu kinerja program pemerintah daerah. Soleh dan Suripto (2011: 7) menyatakan bahwa kinerja program adalah suatu kinerja dalam pencapaian program pemerintah daerah yang sudah menjadi tanggung jawab dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berikut merupakan indikator kinerja utama pemerintah daerah dalam pelaksanaan program (Hermaningsih, 2009) :

1. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Dari Suatu Program

Suatu pencapaian kuantitatif atau kualitatif dalam sebuah organisasi pemerintah daerah tentunya dapat menjadi tolak ukur dalam kinerja yang telah dijalankannya. Apalagi jika kegiatan tersebut bermanfaat bagi pihak lain, hal tersebut menunjukkan suatu pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Ketepatan dan Kesesuaian Hasil

Ketepatan dan kesesuaian hasil dari program kerja yang telah direncanakan merupakan hal yang sangat penting. Semua pihak berperan dalam

terlaksananya program pemerintah, karena terkadang semakin banyak sumber daya manusia yang berperan maka kemungkinan hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang yang telah direncanakan diawal. Dimana ketepatan dan kesesuaian tersebut menunjukkan tercapainya tujuan awal suatu program.

3. Tingkat Pencapaian Program

Dalam Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tentunya terdapat banyak program kerja yang perlu dicapai agar roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Ketika pemerintah mampu mencapai target program maka masyarakat akan ikut merasakan dari pelaksanaan program kerja tersebut.

4. Dampak Hasil Kegiatan Terhadap Kehidupan Masyarakat

Terkadang masyarakat ikut berperan aktif dalam pelaksanaan program pemerintah dan disitulah dengan terlaksananya kegiatan maka otomatis ada dampak atau manfaat yang diterima oleh masyarakat. Pemerintah seharusnya mampu memaksimalkan kinerjanya agar masyarakat puas dengan kegiatan program yang ada sehingga sejahtera.

5. Kesesuaian Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Anggaran

Hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program pemerintah yaitu dengan adanya anggaran sebagai pembiayaan properti yang dibutuhkan pemerintah guna terselenggaranya kegiatan. Diharapkan anggaran yang pada awalnya telah direncanakan sesuai dengan realisasi yang terjadi, hal tersebut dilakukan untuk menghindari lebih atau kurangnya anggaran yang digunakan.

6. Pencapaian Efisiensi Operasional

Efisiensi operasional merupakan upaya untuk mengukur seberapa baik manfaat yang didapat sebagai fungsi dari biaya operasional. Diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan biaya operasional yang tersedia.

7. Moral Perilaku Pegawai

Dasar utama penilaian kinerja pemerintah yang perlu diperhatikan adalah etika atau moral pegawai. Apabila pegawai memiliki etika moral yang baik dalam pelaksanaan program kerja pemerintah maka masyarakat juga akan menilai bahwa kinerja pemerintah sudah maksimal serta program-program yang ada akan tercapai dengan mudah.

Sebagai bahan acuan dan sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Adapun pengambilan tinjauan penelitian terdahulu dilakukan untuk membandingkan hasil, objek, dan subjek dari penelitian ini sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

1. Amerta Felina Kusuma (2021)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Lokasi penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah di Kota Surabaya.

2. Amirudin, Omar Dhanny, Rafika (2019)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda. Lokasi penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis komputer tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dalam penelitian tersebut juga diketahui bahwa sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Samarinda.

3. Evi Damayanti, Suwardi Bambang Hermanto (2018)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. Lokasi penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya.

4. I Gede Agus Sudarsana Putra, I Made Pande Dwiana Putra (2018)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* dan sistem

pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif pada kinerja pemerintah Kabupaten Karangasem.

5. Kristiani Evaranus, Wahidahwati (2020)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran, dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Instansi Pemerintah. Lokasi penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

6. M Rayindha Prasatya Yang, I Wayan Suartana (2017)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kinerja Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian pada Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governacne*, pengelolaan keuangan daerah dan SPIP berpengaruh positif pada kinerja pemerintah daerah.

7. Nuryani Tadeko (2017)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Lokasi penelitian pada Pemerintah Derah Kabupaten Banggai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara simultan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan; (2)

Lingkungan pengendalian secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas pelayanan; (3) Penilaian risiko secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas pelayanan; (4) Kegiatan pengendalian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan; (5) Pemantauan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas pelayanan pada SKPD Kabupaten Banggai.

8. Sandie Davitra Alfitriady, Taufeni Taufik, Devi Safitri (2020)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Lokasi penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan koefisien regresi sebesar 0,974; (2) penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan koefisien regresi sebesar 0,002; (3) gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan koefisien regresi sebesar 0,009.

9. Ageng Gumelar (2021)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Lokasi penelitian pada Pemerintah

Kabupaten Purwakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel maturitas SPIP berpengaruh positif terhadap variabel kinerja instansi pemerintah.

10. Vika Erinna Agustining Tyas, Irma Tyasari, Doni Wirshandono Yogivaria (2020)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Sedangkan secara parsial kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang.

11. I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra, Ni Made Vita Indriyani (2020)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Tri Hita Karana Pada Kinerja Pemerintah. Lokasi penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kinerja pemerintah di pemerintah daerah Kabupaten Badung, budaya tri hita karana berpengaruh positif pada kinerja pemerintah di pemerintah daerah Kabupaten Badung.

12. Welly (2021)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Povinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

13. Winda Mulia Putri, Suwardi Bambang Hermanto (2018)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja. Lokasi penelitian pada BPKPD Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern dan *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sedangkan variabel komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai.

14. Nur Cholis, Fadli (2018)

Melakukan penelitian dengan judul Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Bengkulu. Lokasi penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah; (2) terdapat pengaruh signifikan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah; (3) terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas publik terhadap kinerja instansi pemerintah.

15. Titin Eka Ardiana, La Ode Sugianto, Diana Pramudya Wardhani (2022)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good Governance* Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Lokasi penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *good governance* secara parsial tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo.

16. Mattoasi, Didiet Pratama Musue, Yaman Rauf (2021)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai determinan sebesar 48,7%.

17. Maria Florentina Steni (2022)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Anggaran, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Manggari Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

18. Amelia Amran (2019)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Kota Palopo.

19. Bambang Jatmiko (2020)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Lokasi penelitian pada Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

20. Fatimah Elkha, Wahidahwati (2020)

Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal, akuntabilitas,

dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Terjadinya perbedaan beberapa hasil penelitian tersebut terjadi karena ada perbedaan pada objek penelitian serta waktu dilakukannya penelitian. Berikut merupakan tabel mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Amerta Felina Kusuma (2021), dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Sistem Pengendalian Internal • Variabel Dependen Kinerja Instansi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Akuntabilitas, Transparansi • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah di Kota Surabaya	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi No. 9 Vol. 10 E-ISSN : 2460-0585 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
2	Amirudin, Omar Dhanny, Rafika (2019), dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda (Studi pada SKPD Kota Samarinda)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Sistem Pengendalian Internal • Variabel Dependen Kinerja Instansi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa sistem informasi akuntansi berbasis komputer tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, sedangkan sistem pengendalian internal	Jurnal Eksis No. 1 Vol. 15 ISSN : 0216-6437 Politeknik Negeri Samarinda

				berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dalam penelitian tersebut juga diketahui bahwa sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Samarinda	
3	Evi Damayanti, Suwardi Bambang Hermanto (2018), dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah (Survei pada SKPD Kota Surabaya)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pengendalian Internal • Variabel Dependen Kinerja Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Akuntabilitas, Transparansi • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi No. 3 Vol. 7 E-ISSN : 2460-0585 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
4	I Gede Agus Sudarsana Putra, I Made Pande Dwiana Putra (2018), dengan judul Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada OPD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen <i>Good Governance</i>, Pengendalian Intern Pemerintah • Variabel Dependen Kinerja Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa <i>good governance</i> dan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif pada kinerja pemerintah Kabupaten	E-Jurnal Akuntansi No. 3 Vol. 25 ISSN : 2302-8556 Universitas Udayana

	Karangasem)			Karangasem	
5	Kristiani Evaranus, Wahidahwati (2020), dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran, dan Pengendalian Internal pada Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada OPD Kota Surabaya)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pengendalian Internal • Variabel Dependen Kinerja Instansi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi No. 3 Vol. 9 E-ISSN : 2460-0585 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
6	M Rayindha Prasatya Yang, I Wayan Suartana (2017), dengan judul Pengaruh <i>Good Governance</i> , Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada SKPD Kota Bima)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen <i>Good Governance</i>, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Variabel Dependen Kinerja Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pengelolaan Keuangan Daerah • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa <i>good governacne</i> , pengelolaan keuangan daerah dan SPIP berpengaruh positif pada kinerja pemerintah daerah	E-Jurnal Akuntansi No. 2 Vol. 21 E-ISSN : 2302-8556 Universitas Udayana
7	Nuryani Tadeko (2017), dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen Kualitas Pelayanan 	Hasil dari penelitian ini bahwa (1) Secara simultan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan;(2)	E-Jurnal Katalogis No. 2 Vol. 5 ISSN : 2302-2019 Universitas Tadulako

				Lingkungan pengendalian secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas pelayanan; (3) Penilaian risiko secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas pelayanan; (4) Kegiatan pengendalian secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan; (5) Pemantauan secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas pelayanan pada SKPD Kabupaten Banggai	
8	Sandie Davitra Alfitriady, Taufeni Taufik, Devi Safitri (2020), dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Variabel Dependen Kinerja Instansi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa (1) kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan koefisien regresi sebesar	Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan, dan Bisnis No. 2 Vol. 5 E-ISSN : 2527-8215 Universitas Riau

	(Studi Empiris pada OPD Kabupaten Kepulauan Meranti)			0,974; (2) penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan koefisien regresi sebesar 0,002; (3) gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan koefisien regresi sebesar 0,009	
9	Ageng Gumelar (2021), dengan judul Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Variabel Dependen Kinerja Instansi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa variabel maturitas SPIP berpengaruh positif terhadap variabel kinerja instansi pemerintah	<i>Indonesian Accounting Research Journal</i> No. 1 Vol. 2 ISSN : 2747-1241 Politeknik Negeri Bandung
10	Vika Erinna Agustining Tyas, Irma Tyasari, Doni Wirshandono Yogivaria (2020), dengan judul Pengaruh <i>Good Governance</i> , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen <i>Good Governance</i>, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa <i>good governance</i> dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi No. 1 Vol. 8 E-ISSN : 2715-7016 Universitas Kanjuruhan Malang

				(LKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Sedangkan secara parsial kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang	
11	I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra, Ni Made Vita Indriyani (2020), dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Tri Hita Karana Pada Kinerja Pemerintah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Badung)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Sistem Pengendalian Internal • Variabel Dependen Kinerja Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Budaya Tri Hita Karana • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kinerja pemerintah di pemerintah daerah Kabupaten Bandung, budaya tri hita karana berpengaruh positif pada kinerja pemerintah di pemerintah daerah Kabupaten Badung	Jurnal Lingkungan & Pembangunan No. 1 Vol. 4 ISSN : 2597-7555 University of Warmadewa
12	Welly (2021), dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen Kinerja Organisasi Perangkat Daerah • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap	Jurnal Media Wahana Ekonomika No. 1 Vol. 18 ISSN : 1693-4091 Universitas

	Di Povinsi Sumatera Selatan			kinerja organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan	Muhammadiyah Palembang
13	Winda Mulia Putri, Suwardi Bambang Hermanto (2018), dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja (Survei pada BPKPD Kota Surabaya)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Sistem Pengendalian Intern • Variabel Dependen Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Komitmen Organisasi, <i>Good Corporate Governance</i> • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa variabel pengendalian intern dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sedangkan variabel komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi No. 10 Vol. 7 E-ISSN : 2460-0585 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomika Indonesia Surabaya
14	Nur Cholis, Fadli (2018), dengan judul Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Bengkulu (Studi pada OPD Kota Bengkulu)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pengendalian Intern Pemerintah • Variabel Dependen Kinerja Instansi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Akuntabilitas Publik • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa (1) terdapat pengaruh signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah; (2) terdapat pengaruh signifikan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja	Jurnal Akuntansi No. 3 Vol. 8 ISSN : 2303-0356 Universitas Bengkulu

				instansi pemerintah; (3) terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas publik terhadap kinerja instansi pemerintah	
15	Titin Eka Ardiana, La Ode Sugianto, Diana Pramudya Wardhani (2022), dengan judul Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei pada SKPD Kabupaten Ponorogo)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen <i>Good Governance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Dependen Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa variabel <i>good governance</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo.	<i>International Journal of Economics, Business, and Accounting Research</i> No. 3 Vol. 6 E-ISSN : 2614-1280 Muhammadiyah University of Surakarta, Muhammadiyah University of Ponorogo
16	Mattoasi, Didiet Pratama Musue, Yaman Rauf (2021), dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Gorontalo)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah • Variabel Dependen Kinerja Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai determinan sebesar 48,7%	<i>Jambura Accounting Review</i> No. 2 Vol. 2 E-ISSN : 2721-3617 Universitas Negeri Gorontalo
17	Maria Florentina Steni (2022), dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Anggaran, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Manggarai Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pengendalian Internal • Variabel Dependen Kinerja Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Anggaran • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, partisipasi anggaran berpengaruh positif	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi No. 9 Vol. 11 E-ISSN : 2460-0585 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

				terhadap kinerja pemerintah daerah, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah	
18	Amelia Amran (2019), dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pengendalian Internal • Variabel Dependen Kinerja Instansi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pemanfaatan Teknologi Informasi • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitan ini bahwa pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Kota Palopo	Jurnal STIEM No. 1 Vol. 5 ISSN : 2339-1502 Universitas Muhammadiyah Palopo
19	Bambang Jatmiko (2020), dengan judul Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei pada SKPD Kabupaten Sleman)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pengawasan Internal • Variabel Dependen Kinerja Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Akuntabilitas, Transparansi • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitan ini bahwa pengawasan Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah	Jurnal Akuntansi Trisakti No. 2 Vol. 7 ISSN : 2339-0832 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

				daerah, dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah	
20	Fatimah Elkha, Wahidahwati (2020), dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada OPD Kabupaten Gresik)	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Pengendalian Internal • Variabel Dependen Kinerja Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen Akuntabilitas, Transparansi • Tempat penelitian 	Hasil dari penelitian ini bahwa variabel pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi No. 2 Vol. 7 E-ISSN : 2460-0585 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
Rindi Septiani (2022): Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada SKPD di Kota Tasikmalaya). Dengan menggunakan indikator: <i>Good Governance</i> (X_1), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2), dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y)					

Berdasarkan kajian pustaka dan kajian empiris yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya maka penulis ingin menguji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan objek yang sama dan periode yang berbeda akan memberikan hasil informasi yang berbeda atau sama.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dimana beban tanggungjawabnya pemerintah selaku organisasi sektor publik terbesar yang harus

memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah salah satunya yaitu *good governance*. *Good governance* adalah suatu konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pembangunan sektor publik (Mardiasmo, 2009: 18). Tata kelola dalam pemerintah harus disusun dan dirancang sebaik mungkin agar organisasi pemerintah tersusun efektif sehingga pembagian penugasan dan yang lainnya semakin terarahkan. Adapun indikator dari *good governance* yang harus dicapai oleh pemerintah daerah diantaranya yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, *responsive*, berorientasi pada konsesus, keadilan atau kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Good governance merupakan modal utama bagi suatu instansi atau organisasi. *Good governance* berperan sangat penting guna mengelola keorganisasian. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari kinerja yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut. Kinerja organisasi sektor publik menggambarkan ukuran ukuran mengenai telah terlaksananya tujuan atau visi yang telah ditetapkan berdasarkan startegi yang digunakan oleh organisasi. Prinsip dalam *good governance* digunakan untuk mengatur hubungan pemerintahan, msayarakat, dan dunia usaha. *Good governance* membuat keseimbangan kinerja antara pemerintahan sebagai pelayanan publiknya. Pemerintah dapat menerapkan *good governance* untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penerapan *good govenance* secara maksimal maka akan meningkatkan

efisien dan efektivitas dari pemakaian sumber daya yang ada pada setiap organisasi (Taufik dan Kamala, 2013). Masyarakat akan ikut merasakan jika kualitas pencapaian program kerja meningkat maka akan menilai bahwa kinerja pemerintah pun tergolong bagus.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yang dan Suartana (2017) menyatakan bahwa *good governance* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian tersebut diperjelas oleh Putra (2018) yang menjelaskan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut diperkuat karena semakin baik penerapan *good governance* yang diterapkan maka akan semakin meningkat pula jalannya kinerja pemerintah daerah.

Adapun faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2014: 163). Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi indikator dari sistem pengendalian intern pemerintah yang harus dicapai

oleh pemerintah daerah diantaranya yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan pengendalian.

Dari lima unsur di atas saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya dan diharapkan dapat mengontrol setiap peristiwa atau masalah yang terjadi pada pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, dengan adanya sistem pengendalian intern yang maksimal, diharapkan dapat terciptanya kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap setiap kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya penyimpangan dan mampu meminimalisir adanya tindakan yang merugikan negara. Sistem pengendalian intern pemerintah juga dibutuhkan pada pemerintah daerah guna mencapai tujuan organisasinya. Pemerintah daerah melakukan pengendalian untuk memantau pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan lebih terjamin. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan faktor penting dan diharapkan mampu mencegah pelaksanaan kegiatan yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya penerapan pengendalian intern, maka akan terciptanya pemerintahan yang ekonomis, efektif, dan efisien dalam instansi yang pada akhirnya akan tetap mengacu pada kinerja pemerintah. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik dalam setiap unit atau divisi yang ada dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut (Alfitriady et al., 2020).

Didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2021). Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Pada penelitian ini diperkuat oleh Amran

(2019) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut diperjelas karena semakin penerapan sistem pengendalian internnya baik pada setiap unit atau divisi yang ada dalam organisasi maka dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut.

Good governance dan sistem pengendalian intern pemerintah dijadikan sebagai acuan atau cermin untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam roda pemerintahan, maka dari itu agar penerapan prinsip *good governance* berjalan dengan tepat maka diperlukan pula sistem pengendalian intern pemerintah yang maksimal atau memadai. Hal tersebut disebabkan karena ketika dalam penerapan tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* tersusun dengan tepat maka akan mempengaruhi dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern yang ada pada roda pemerintahan. Ketika pelaksanaan *good governance* tersusun secara tepat maka proses pengendalian intern pemerintah akan berjalan dengan lancar dan akan terhindar dari kesalahan atau kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi (Harmintarti, 2021). Namun apabila sebaliknya, ketika pelaksanaan *good governance* tidak tersusun dengan tepat maka akan menyebabkan terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam pelaksanaan suatu organisasi pemerintahan. Kesalahan yang fatal akan menghambat berjalannya suatu organisasi pemerintah, sehingga roda pemerintah akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki keterkaitan dengan *good governance* karena tanpa adanya sistem pengendalian intern pemerintah yang ditumbuhkan dengan baik maka akan mempengaruhi tata kelola pemerintah atau *good*

governance terganggu serta pelaksanaan program pemerintah tidak akan berjalan baik.

Kinerja pemerintah daerah pada dasarnya adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2016: 67). Kinerja seseorang adalah kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya (Sulistiyani, 2003: 223). Dimana kinerja pemerintah daerah dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang merupakan media utama untuk menuangkan kinerja pemerintah daerah. Adapun yang menjadi indikator dari kinerja pemerintah daerah yang harus dicapai oleh pemerintah diantaranya yaitu pencapaian target kinerja kegiatan dari suatu program, ketepatan dan kesesuaian hasil, tingkat pencapaian program, dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat, kesesuaian realisasi anggaran sesuai dengan anggaran, pencapaian efisiensi operasional, dan moral perilaku pegawai.

Agar terlaksananya kinerja pemerintah daerah yang berkualitas maka dibutuhkan *good governance* yang tertata dalam kinerja pemerintah daerah. *Good governance* atau tata kelola pemerintah yang tersusun dengan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai dapat membantu dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang berkualitas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018). Hasil penelitian menyatakan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif pada kinerja pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah

merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas LAKIP, kuat lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah yang didukung oleh penerapan *good governance* untuk menentukan kualitas LAKIP yang dihasilkan. Pemerintah dapat menerapkan sistem pengendalian intern untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah, karena semakin baik sistem pengendalian intern yang dilakukan maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah

Berdasarkan hasil kerangka pemikiran dan didasari oleh pada penelitian terdahulu, penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui lebih dalam mengenai seberapa besar pengaruh tidak langsung dari *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kota Tasikmalaya. Alasan replikasi penelitian ini adalah untuk menguji kembali apakah dengan menggunakan teori yang sama, tetapi dengan sampel, lokasi, dan tahun yang berbeda akan memberikan hasil yang sama dengan penelitian terdahulu.

Maka berikut dapat digambarkan kerangka pemikiran dan indikator yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013: 134).

Maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan signifikan *Good Governance* dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada SKPD Kota Tasikmalaya
2. Terdapat pengaruh signifikan secara parsial *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya
3. Terdapat pengaruh signifikan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya